

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

- Secara tahunan, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 tercatat sebesar 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV 2023 sebesar 2,43% (yoy) namun lebih rendah dari Triwulan I 2023 sebesar 6,56% (yoy). Lebih lanjut, Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Secara spasial, inflasi Hulu Sungai Tengah (3,68%, yoy) merupakan yang tertinggi, diikuti Banjarmasin (2,58%, yoy), Kotabaru (2,41%, yoy), Tanah Laut (2,29%, yoy) dan Tanjung (1,64%, yoy).
- Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau; perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok transportasi. Adapun satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan dengan andil sebesar -0,05%. Berdasarkan komoditas, inflasi pada triwulan I 2024 terutama bersumber dari komoditas emas perhiasan, beras, daging ayam ras, ikan nila dan gula pasir.
- Dengan perkembangan pada bulan Maret 2024 dan beberapa indikator harga, tekanan inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan II 2024 diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan Triwulan I 2024. Penurunan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh peningkatan pasokan bahan pangan di tengah normalisasi permintaan pasca pelaksanaan HBKN Idul Fitri. Lebih lanjut, dengan berlalunya perayaan-perayaan HBKN dan cuti bersama pada Triwulan I 2024, diperkirakan akan menurunkan tekanan inflasi pada kelompok transportasi, khususnya tarif angkutan udara. Di sisi lain penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan yang diperkirakan akan terus berlanjut sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global serta dampak dari suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) yang masih tinggi.
- Prospek inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan lebih tingginya tekanan inflasi pada keseluruhan tahun 2024 bersumber dari tingginya fluktuasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta dampak transmisinya pada komoditas-komoditas kelompok Penyediaan makanan dan minuman (a.l makanan jadi). Fluktuasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dampak *second round effect* fenomena el nino yang terjadi pada tahun 2023, menyebabkan gangguan dan pergeseran musim tanam dan panen komoditas pangan. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor risiko yang diperkirakan dapat mendorong tekanan inflasi antara lain: (1) kenaikan permintaan yang tidak diimbangi sisi *supply* (pasokan dan produksi) yang memadai, berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas pangan di tengah pergeseran pola tanam dan panen tanaman pangan dan hortikultura; (2) risiko gangguan produksi akibat anomali cuaca; dan (3) potensi serangan hama/OPT. Mencermati potensi tersebut, berbagai kegiatan pengendalian inflasi pangan melalui sinergi kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka TPID terus dilanjutkan tercermin dari komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam merespon kenaikan tekanan inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Januari 2024

Pada Januari 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,55% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Desember 2023 sebesar 0,18% (mtm), dan lebih tinggi dari inflasi Nasional sebesar 0,04% (mtm). Realisasi inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata historis inflasi bulan Januari selama 3 tahun terakhir sebesar 0,32% (mtm), serta lebih tinggi dari prakiraan awal. Inflasi terutama didorong oleh peningkatan indeks kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Peningkatan indeks kelompok makanan, minuman dan tembakau disebabkan oleh kenaikan tekanan harga komoditas ikan gabus, daging ayam, ikan nila, tomat dan bawang merah. Kenaikan harga komoditas ikan gabus dan nila disebabkan oleh kenaikan permintaan, di tengah penurunan hasil produksi ikan budidaya pada musim peralihan. Kenaikan harga komoditas ayam disebabkan oleh kenaikan harga pakan. Sementara itu, kenaikan harga tomat dan bawang merah disebabkan oleh pasokan yang menurun serta produktivitas tanaman yang berkurang akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan kenaikan harga emas global serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global. Sementara itu, beberapa komoditas menjadi penahan kenaikan tekanan inflasi antara lain: komoditas cabai rawit, telur ayam ras, ikan peda, buncis dan ketimun seiring dengan ketersediaan komoditas yang terjaga di pasaran. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat sebesar 2,79% (yoy); lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,43% (yoy). Kenaikan inflasi tahunan terutama disumbang oleh peningkatan indeks harga ikan gabus, daging ayam ras, emas perhiasan, ikan nila dan sigaret kretek mesin (SKM). Sementara itu, komoditas yang memberikan andil terbesar penahan peningkatan tekanan inflasi, yakni telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, dan televisi berwarna.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Februari 2023

Pada Februari 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm), menurut dibanding Januari 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm) dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 0,07% (mtm) dan Nasional sebesar 0,37% (mtm). Kondisi ini relatif stabil dibandingkan rata-rata historis inflasi Februari selama 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,07% (mtm). Realisasi inflasi (mtm) tersebut didorong oleh kelompok pengeluaran transportasi serta kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau, sedangkan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 2,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 2,79% (yoy). Perkembangan inflasi IHK tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dalam menurunkan laju inflasi. Realisasi inflasi IHK Februari 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang disumbang oleh kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm). Penurunan kelompok pengeluaran transportasi dipengaruhi oleh menurunnya harga avtur sejalan dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya HBKN Nataru dan perayaan Haul Guru Sekumpul. Lebih lanjut, kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau juga mengalami deflasi sebesar -0,02%. Komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah daging ayam ras, bawang merah, tarif angkutan udara, ikan papuyu dan jagung manis. Di sisi lain, komoditas pendorong inflasi bulanan terbesar disumbangkan oleh kelompok

pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,02% (mtm) yang bersumber dari komoditas beras, telur, aneka cabai, sigaret kretek mesin dan emas perhiasan. Peningkat komoditas beras berasal dari komoditas beras jenis premium, yang secara pencatatan mengacu pada harga beras premium nasional seperti beras pulen dan pandanwangi sehingga terpengaruh oleh peningkatan harga beras di sentra produksi nasional.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Kalimantan Selatan Maret 2023

Pada Maret 2024, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm), meningkat dibanding Februari 2024 yang mengalami deflasi sebesar 0,01% (mtm) serta lebih tinggi dibandingkan inflasi Kalimantan sebesar 0,44% (mtm) dan Nasional sebesar 0,52% (mtm). Kondisi ini relatif stabil dibandingkan rata-rata historis inflasi Maret selama 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,10% (mtm). Realisasi inflasi (mtm) tersebut didorong oleh kelompok pengeluaran makanan minuman dan tembakau, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat 2,58% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 2,27% (yoy). Perkembangan inflasi IHK tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam menurunkan laju inflasi. Realisasi inflasi IHK Maret 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yang disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,41% (mtm). Peningkatan kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau dipengaruhi oleh meningkatnya harga beras, telur dan daging ayam ras dampak dari bergesernya masa panen akibat cuaca ekstirm serta meningkatnya permintaan menjelang dimulainya Bulan Suci Ramadhan. Lebih lanjut, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,07% didorong oleh komoditas emas perhiasan. Secara keseluruhan, komoditas utama pendorong inflasi bulanan adalah beras, daging dan telur ayam ras, emas perhiasan, dan ikan papuyu. Di sisi lain, komoditas penahan inflasi bulanan terbesar disumbangkan oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil -0,01% (mtm) khususnya subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga. Peningkatan komoditas beras berasal dari komoditas beras jenis premium, yang secara pencatatan mengacu pada harga beras premium nasional seperti beras pulen dan pandanwangi sehingga terpengaruh oleh peningkatan harga beras di sentra produksi nasional. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan tercatat sebesar 2,58% (yoy); lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 2,27% (yoy). Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, khususnya komoditas emas perhiasan, beras, daging ayam ras, ikan nila, gula pasir, sigaret kretek mesin, telur ayam ras, bawang putih, cabai merah, tomat, udang basah, ikan gabus, nasi dengan lauk.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ Periode Januari 2024

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada bulan Januari

2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dan Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan terus diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, bawang, dan telur ayam dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pasar Murah di Kota Banjarbaru dalam rangka perayaan Haul Guru Sekumpul ke-19 pada tanggal 10-11 Januari 2024
 2. Pasar Murah di Kab. Tanah Laut pada 11 Januari 2024 bersama dengan Dinas Koperasi;
 3. Pasar Murah di Kota Banjarmasin pada 11 Januari 2024; dan
 4. Pasar Murah di Kab. Balangan pada 23 Januari 2024 yang dilaksanakan oleh Bulog.
- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mendahulukan angkutan logistik pangan.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan Gernas Dampak El Nino dari Kementan untuk lahan seluas 100.000 hektar. Dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana pertanian hingga pengolahan pasca panen yang akan memasuki masa panen pada Tw-I 2024.

- Upaya Komunikasi Efektif

(1) Pada 18 Januari 2024, dilaksanakan kegiatan Obrolan Pagi Seputar Inflasi (OPSI) Prov. Kalsel terkait evaluasi TPID 2023 serta rencana kerja TPID tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu forum evaluasi kinerja inflasi secara informal serta dihadiri oleh pimpinan instansi yang tergabung dalam TPID;

(2) Pada 22 Januari 2024, dilakukan HLM TPID Kab. Tanjung yang dihadiri oleh Bupati Tabalong dan Ka KPwBI Kalsel dengan tindak lanjut berupa kesepakatan mendorong penguatan Perumda Tabalong Jaya sebagai BUMD pangan;

(3) Pada 22 Januari 2024, dilaksanakan audiensi bersama Bupati HST, sebagai salah satu kota penghitungan IHK yang baru untuk wilayah Kalsel. Audiensi yang dihadiri oleh Ka KPwBI Kalsel menghasilkan tindak lanjut berupa penyusunan MoU kerja sama antara KPwBI Kalsel dengan Pemkab HST dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya melalui penguatan peran UMKM;

(4) Pada 24-26 Januari 2024, telah dilaksanakan kegiatan capacity building penyusunan laporan dan One Page Summary (OPS) program kerja TPID Kalsel tahun 2023.

- **Periode Februari 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Februari 2024

menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dan Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan terus diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, bawang, dan telur ayam dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pasar Murah di Kab. Hulu Sungai Tengah pada 20 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Biro perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Pasar Murah di Kab. Hulu Sungai Utara pada 24 Januari 2024; dan
 3. Pasar Murah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan di 12 lokasi berbeda dengan lama waktu pelaksanaan pada tanggal 1- 20 Februari 2023.
 4. Penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah di Kab. Tapin yang dilaksanakan pada tanggal 16, 19 dan 20 Februari 2024.
- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mendahulukan angkutan logistik pangan.

- Upaya Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan KAD oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pemenuhan ketersediaan beras Pamanukan. Lebih lanjut, Pelaksanaan Gernas Dampak El Nino dari Kementan untuk lahan seluas 100.000 hektar yang saat ini realisasi tanamnya sudah mencapai 104%. yang akan memasuki masa panen pada triwulan I 2024.

- Upaya Komunikasi Efektif

(1) Pada 19 Februari 2024, dilaksanakan kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Kab. Banjarbaru dan dilaksanakan sebagai suatu forum rapat pimpinan TPID Kota Banjarmasin dalam merumuskan kebijakan ke depannya. Kegiatan HLM tersebut mencakup perkembangan inflasi bulan berjalan beserta asesmennya, laporan kondisi cuaca berdampak inflasi dan perkembangan cadangan pasokan komoditas pangan.

(2) Pada 20 Februari 2024, dilakukan HLM TPID Kab. Hulu Sungai Tengah yang dipimpin oleh Sekda Kab. HST. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai pendampingan bagi TPID Kab. HSU sebagai kota IHK baru di Provinsi Kalimantan Selatan.

- **Periode Maret 2024**

Berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pada Maret 2024 menekankan pada keberlanjutan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah dan Rapat Koordinasi dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam rangka pengendalian inflasi secara berkelanjutan, TPID se-Kalimantan Selatan telah melakukan upaya untuk menjamin kecukupan pasokan pangan di berbagai daerah melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

Upaya Mengendalikan Keterjangkauan Harga

Pengendalian harga melalui Operasi Pasar dan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan terus diselenggarakan untuk mengendalikan komoditas bahan pokok penting seperti minyak goreng, tepung terigu, beras, bawang, dan telur ayam dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Operasi Pasar di Kab. Tapin pada 4 Maret;
 2. Pasar Murah di Kota Banjarmasin pada 5, 7, 8, 13, 18, 19 Maret 2024 yang diselenggarakan oleh Pemkot Banjarmasin dengan bekerjasama dengan Bulog;
 3. Pasar Murah bersubsidi di Kab. Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan selama Bulan Ramadhan;
 4. Pasar Murah di Kab. Tapin yang dilaksanakan pada tanggal 16, 18, 20, 21 Maret 2024; dan
 5. Pasar Murah yang diselenggarakan oleh Pemkot Banjarbaru pada tanggal 16 Maret 2024.
- Upaya Kelancaran Distribusi

Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam rangka mendahulukan angkutan logistik pangan.

- Upaya Ketersediaan Pasokan
 - 1. Pelaksanaan KAD oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam pemenuhan ketersediaan beras Pamanukan. Lebih lanjut, Pelaksanaan Gernas Dampak El Nino dari Kementan untuk lahan seluas 100.000 hektar yang saat ini realisasi tanamnya sudah mencapai 104%. yang sudah memulai panen pertama pada tanggal 25 Maret 2024 di Kab. Hulu Sungai Tengah.
 - 2. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam pengadaan komoditas pangan dengan Kab. Subang (beras), Kab. Blitar (telur), dan Nganjuk (bawang merah).
- Upaya Komunikasi Efektif
 - 1. Pada 1 Maret 2024, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi TPID se-Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan selaku ketua TPID Kalimantan Selatan, Pimpinan lembaga vertikal di Kalimantan Selatan, TPID Kab/Kota se-Kalimantan Selatan serta seluruh SKPD terkait. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan bersama rencana aksi pengendalian inflasi sepanjang tahun 2024 oleh 13 SKPD terkait di Kalsel.
 - 2. Pada 27 Maret 2024, dilakukan Kick-off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan wilayah Kalimantan yang dilaksanakan di Kota Samarinda. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk sinergi dan kolaborasi TPID seluruh Kalimantan dalam mengendalikan inflasi pangan di Kalimantan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai stakeholders strategis di daerah. Koordinasi kebijakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga terus

diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan didukung penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor), dukungan penyelenggaraan operasi pasar dan pasar murah, maupun inovasi budidaya tanaman pangan seperti budidaya padi apung yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan, akan terus diperkuat respons kebijakan guna memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi sehingga inflasi tetap terjaga dalam kisaran $2,5 \pm 1\%$.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Melaksanakan pemantauan dan peninjauan pasar secara berkala untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kalimantan Selatan.
- Memperkuat pengawasan barang kebutuhan pokok dengan instansi terkait khususnya Satgas Pangan.
- Memberikan skala prioritas bagi angkutan untuk barang kebutuhan pokok pada setiap SPBU untuk kelancaran distribusi.
- Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah untuk menjaga kestabilan pasokan pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi.
- Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID Provinsi maupun dengan TPID Kabupaten/Kota terkait langkah - langkah dalam pengendalian inflasi daerah.
- Melaksanakan Operasi Pasar/Pasar Murah TPID Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan kegiatan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah.
- Melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
- Melakukan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas (Padi Apung).
- Dibutuhkan sinergis dan kolaborasi seluruh anggota TPID dalam mengantisipasi dampak El nino.
- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM).
- Pelaksanaan Capacity Building (CB).
- Menambahkan pasokan beras bekerjasama dengan Bulog.
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada seluruh Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pemantapan divisi pangan PT. Bangun Banua Kalimantan Selatan dalam rangka persiapan pengelolaan cold storage bantuan dari Badan Pangan Nasional RI.
- Mengeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Pengendalian Harga, Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas bahan Pangan pokok menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H.
- Koordinasi Pengembangan Divisi Pangan PT. Bangun Banua untuk menjadi salahsatu penyedia kebutuhan pangan di kalimantan selatan untuk pengendalian inflasi.
- Mengantisipasi Kenaikan Hrga Pangan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- Koordinasi rencana kerjasama divisi pangan PT. Bangun Banua dengan Pengelola Sistem Resi Gudang (SRG) untuk Pengendalian Inflasi